

BAB VII

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1. Kesimpulan

Penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan di bab terdahulu terdapat kesimpulan bahwa aplikasi *eplanning* dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) terbukti telah mempermudah bagi Bappeda dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah maka pemerintah Kabupaten Gresik meningkatkan kinerja dengan tertib administrasi dan tepat waktu dalam perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana yang telah diamanatkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pembangunan daerah. Kabupaten Gresik sudah melaksanakan amanat permendagri Nomor 86 tahun 2017 dengan menerapkan *e-planning* tetapi pelaksanaannya belum dapat maksimal.

Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Gresik pada periode Tahun 2016-2021 selain konsep substansif perencanaan yang mampu mengintegrasikan kaidah-kaidah perencanaan tetapi juga didukung dengan penggunaan teknologi yaitu *e-planning*, dengan pemanfaatan teknologi *e-planning* untuk memudahkan perencana dalam melaksanakan berbagai tahapan perencanaan dalam penyusunan dokumen perencanaan serta

mensinkronisasikan berbagai pendekatan perencanaan terutama pendekatan politis.

7.1.1 Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA) dalam Pembangunan Kabupaten Gresik

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA) memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah, karena lembaga inilah yang bertanggungjawab dalam hal pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Bappeda Kabupaten/Kota menjadi salah satu perangkat daerah yang bertugas melaksanakan fungsi perencanaan dalam hal pembangunan daerah, wujud peranan Bappeda dalam melaksanakan pembangunan dalam hal perencanaan dapat dilihat dari berbagai aspek. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan peranannya, Bappeda melaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dengan melaksanakan serangkaian proses yang berkaitan dengan pembangunan daerah, baik itu dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga proses monitoring dan evaluasi.

Salah satu tolak ukur keberhasilan peranan Bappeda dalam pembangunan daerah adalah dilihat dari aspek pelaksanaan fungsi Bappeda itu sendiri, dimana dalam pelaksanaannya berbagai aktivitas yang berdampak pada perumusan perencanaan pembangunan yang merupakan faktor kunci dan awal keberhasilan dari pencapaian tujuan pembangunan dalam berbagai bidang.

Proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan merupakan salah satu bagian tahapan yang dapat dilihat dalam proses Musrenbang. Musrenbang yang dimaksud adalah forum konsultasi publik antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau biasa di singkat RKPD Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Untuk menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dalam bentuk RKPD, dilakukan penyerapan dan penjaringan aspirasi berupa forum Musrenbang. Sebelum pelaksanaan Musrenbang didahului dengan beberapa tahapan proses perumusan arah dan kebijakan yang menjadi dasar pengambilan keputusan dan kesepakatan terhadap Rancangan awal RKPD. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Bappeda adalah Badan penyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di daerah baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun rencana tahunan.

7.1.2 Manfaat Aplikasi *e-Planning* dalam Penyusunan RKPD di Kabupaten Gresik

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA) merupakan satu-satunya badan di daerah yang diwajibkan untuk menggunakan aplikasi perencanaan atau *e-planning*. BAPPEDA Kabupaten Gresik juga menggunakan aplikasi perencanaan yang biasa disebut *e-planning*. Penggunaan aplikasi ini masih tergolong suatu hal baru karena *e planning* baru terapkan pada tahun 2017. Meskipun masih tergolong baru namun manfaat yang diperoleh sangat membantu pekerjaan

pegawai/ASN dalam hal perencanaan. Penggunaan aplikasi perencanaan tidak rumit dan mudah dipahami sehingga pegawai yang bekerja di bidang perencanaan merasa terbantu dan tidak membutuhkan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan sistem perencanaan *e-planning* lebih banyak manfaatnya. Strategi perencanaan juga dilaksanakan dengan sistem perumpunan atau kerja sama tim, sehingga seluruh pegawai BAPPEDA ikut menjadi bagian dalam perencanaan menggunakan aplikasi *e-planning*. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan penggunaan *e-planning* terdiri dari faktor pendorong atau pendukung dan faktor penghambat atau bisa lebih disebut dengan tantangan. Terdapatnya tantangan atau faktor penghambat tidak lekas menjadi penghambat dalam penerapan *e-planning*. Justru dari adanya tantangan tersebut membuat pihak BAPPEDA lebih tertantang untuk berusaha memperbaiki sistem, cara penggunaan *eplanning*, dan meningkatkan sumber daya manusianya.

7.2 Saran

Sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan dilapangan terdapat beberapa saran yang direkomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik khususnya Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA) sebagai salah satu OPD/SKPD yang bertanggung jawab terhadap perencanaan di Kabupaten Gresik khususnya pengelola aplikasi *eplanning* yang masih terdapat kekurangan, walaupun aplikasi *eplanning* sangat efektif dan efisien dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Gresik, saran dan masukan ini

semoga dapat menjadi umpan balik untuk perbaikan aplikasi *eplanning* anatar lain :

1. Aplikasi *eplanning* bagi operator desa hanya digunakan pada saat memasukkan usulan pembangunan hasil dari musrenbang desa sekitar bulan Desember s.d Pebruari setelah itu operator desa berhenti dan lupa lagi, sehingga setiap tahun Bappeda selalu menugaskan stafnya untuk mengajari memasukkan usulan, itu sudah berjalan beberapa kali, hal itu disebabkan karena *eplanning* masih belum bisa terintegrasi dengan aplikasi yang ada di desa, misalnya siskeudes atau aplikasi lainnya. Jadi pada tahap penganggaran didesa masih of line belum bisa nyambung dengan *eplanning*.
2. Bappeda sebagai pengelola *eplanning* harus bisa memberikan tekanan atau pemahaman kepada kepala desa agar tidak selalu mengganti operator desa yang di tugaskan memasukkan usulan pembangunan ke dalam *eplanning* agar tidak selalu mengulang dari awal lagi.
3. Aplikasi *eplanning* belum bisa online dengan penganggaran (*ebudgeting*) sehingga dalam penganggaran masih dilakukan secara manual sehingga integrasi belum bisa terjadi.
4. Dengan aplikasi *eplanning* Bappeda harus berani membuat kesepakatan antara eksekutif dan legislatif dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) seharusnya RKPD lebih cepat terselesaikan dan penetapannya dapat lakukan tepat waktu, tetapi sering terjadi molor dalam penetapan RKPD sehingga berpengaruh juga dengan penetapan

APBD, itu disebabkan tidak tertibnya anggota DPRD dalam memasukkan usulan yang selalu minta di ganti yang berakibat rentang waktu yang sudah ditetapkan tidak tercapai.

5. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Bappeda yang benar-benar paham akan aplikasi *eplanning* sangat kurang sehingga untuk mengoperasionalkan atau melakukan pendampingan ke desa-desa dan OPD yang akan entry renja masih harus dilakukan penyegaran terkait aplikasi *eplanning* bagi pendamping atau pengajar yang akan di tugaskan mendampingi.

7.3 Rekomendasi

Dari paparan yang bersifat evaluatif pada bab-bab terdahulu sebagaimana yang dapat terbaca di bagian simpulan seperti di atas maka peneliti mencatat sejumlah rekomendasi yang penting untuk dijadikan pertimbangan dalam penerapan aplikasi *eplanning* dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun secara lebih terperinci dapat terbaca sebagai berikut:

- 1) Perlu adanya perbaikan fasilitas yang di tawarkan oleh aplikasi *eplanning* atau aplikasi lain sejenis *eplanning* tetapi mampu memberikan fasilitas atau menu yang lebih dari aplikasi *eplanning*, sehingga kedepan dapat terintegrasi mulai dari perencanaan (*planning*), penganggaran (*ebudgeting*), monitoring sampai dengan evaluasi dapat diintegrasikan dengan baik untuk menuju pemerintahan yang baik.

- 2) Pihak eksekutif harus berani menyampaikan dengan dasar hukum /peraturan yang berlaku kepada pihak legislatif agar tidak melanggar kesepakatan yang sudah disepakati bersama agar penetapan RKPD dan APBD tepat waktu sesuai jadwal yang sudah di tentukan.

7.3.1 Implikasi Teoritis dan Urgensi Penelitian

7.3.1.1. Implikasi Teoritis Penelitian

Pada akhirnya penelitian ini memberikan implikasi teoritis yang menekankan betapa pentingnya Aplikasi *E planning* dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana yang disampaikan Juniawan (2019) Bappeda dan Litbang Kabupaten Gianyar Balimenyatakan bahwa mengadopsi sistem perencanaan terintegrasi Geyer (2006: 1) bahwa perencanaan pembangunan terintegrasi melalui penerapan *e-Planning*. *E-Planning* berperan pada fase Persiapan yaitu pengumpulan data dan informasi pembangunan, fase Strategi yaitu tahap memasukkan usulan pembangunan dan verifikasi usulan Musrenbang RPJMD, fase Integrasi yaitu mengintegrasikan visi misi, tujuan, sasaran sampai pada program daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Terkait dengan penelitian ini maka ada empat variabel yang menentukan efektivitas aplikasi *eplanning*, meliputi kualitas, kuantitas, dan waktu :

- 1) Efektivitas, ukuran berhasil tidaknya aplikasi *e planning* dalam pencapaian tujuan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya yaitu perencanaan pembangunan kedalam sebuah Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD). Apabila suatu organisasi tercapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Jadi aplikasi *eplanning* yang di laksanakan di Kabupaten Gresik sudah efektif dan efisien jika dibandingkan sebelum menggunakan aplikasi *eplanning* dengan sesudah menggunakan aplikasi *eplanning*. Input yang dilakukan oleh operator desa ke dalam *eplanning* yang selanjutnya akan diproses oleh operator kecamatan kemudian di eksekusi oleh operator kabupaten untuk di lakukan validasi dengan menentukan layak atau tidak layak dengan beberapa persyaratan yang kelanjutannya sebagai outputnya yaitu tertuangnya usulan-usulan tersebut ke dalam RKPD dan sebagai out comenya yaitu dilaksanakan suatu susulan tersebut yang merupakan salah satu indikator dari dampak atau akibat dilaksanakannya usulan tersebut.

- 2) Kualitas, kepuasan pelanggan sepenuhnya atau pengguna *eplanning* (full customer satisfaction). Suatu produk dikatakan berkualitas apabila dapat memberi kepuasan sepenuhnya kepada konsumen atau pengguna aplikasi, yaitu sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen atas suatu produk. Aplikasi *e planning* ini terbukti sudah memberikan kepuasan kepada penggunanya walaupun aplikasi *e planning* masih terdapat

kekurangan yang harus segera mendapatkan prioritas untuk perbaikannya.

- 3) Kuantitas, tolok ukur suatu hal yang tertuju pada jumlah atau nilai yang dapat dihitung secara pasti. Misalnya jumlah peserta suatu pertemuan, jumlah karyawan, dan lain sebagainya, maksudnya aplikasi *e planning* di katakan efektif jika jumlah atau nilai yang dikeluarkan atau dikorbankan untuk menerapkan aplikasi *e planning* dengan hasil yang di dapatkan lebih besar (Jumlah Hasil yang didapatkan dari *e planning* > Jumlah Rupiah / Waktu yang di keluarkan = Efektif).
- 4) Waktu, Dalam Kamus Bahasa Indonesia paling tidak terdapat 7 item yang menjadi arti dari kata waktu antara lain (Departemen Pendidikan RI, 2008: 161) :
 - a) seluruh rangkaian saat ketika proses; perbuatan atau keadaan berada atau berlangsung; artinya serangkaian kegiatan dalam proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tentunya hanya butuh waktu yang singkat.
 - b) lamanya (saat tertentu);
 - c) saat tertentu untuk melakukan sesuatu;
 - d) kesempatan, tempo, peluang;
 - e) ketika, saat;
 - f) hari (keadaan hari) dan
 - g) saat yang ditentukan berdasarkan pembagian bola dunia

7.3.1.2. Urgensi Penelitian

- 1) Hasil dari penelitian ini menjadi penting untuk diperhatikan dan kemudian ditindaklanjuti. Melihat betapa pentingnya aplikasi *e planning* yang efektif dan efisien dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maka hasil penelitian ini menjadi pendorong agar pihak terkait bisa serius untuk melakukan evaluasi dan monitoring demi perbaikan aplikasi *e planning* yang sudah membantu dan mempermudah tugas dari Bappeda dalam penyusunan RKPD Kabupaten Gresik selama beberapa tahun terakhir ini.
- 2) Hasil penelitian ini adalah menemukan model tata cara kinerja dan tata kelola data usulan pembangunan yang di mulai dari Musrenbang Desa sampai Musrenbang Kabupaten sebagai implikasi dari aspirasi dari masyarakat bawah (*bottom Up*) yang di bahas oleh eksekutif dan legeslatif kemudian ada kesepakatan yang akan di bawah ke tingkat kabupaten yang di tetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik.
- 3) Hasil penelitian ini dapat memicu peneliti-peliti lain untuk melakukan penelitian serupa yang lebih sempurna lagi. Atmosfer ilmiah sangat penting dalam menunjang semua produk-produk Informasi Teknologi (IT) agar matang dan tepat perencanaan, tepat anggaran, tepat waktu, tepat sasaran dan tepat implementasinya.

7.3.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian masih jauh dari kata sempurna mengingat hanya satu studi kasus yakni efektivitas aplikasi *e planning* dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan terbatas pada satu lokus penelitian yaitu Bappeda Kabupaten Gresik sebagai OPD yang membidangi perencanaan dan pengelola aplikasi *e planning* yang merupakan cikal bakal aplikasi yang akan mampu mengintegrasikan tahapan perencanaan mulai entry usulan sampai pada penganggaran, evaluasi dan monitoring, untuk mencapai suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*good goverment*).

Karena itu penelitian ini memiliki keterbatasan dan kekurangan. Masih diperlukan banyak lagi penelitian selanjutnya agar dapat melengkapi kekurangan dan kelemahan penelitian ini guna penyempurnaan aplikasi *e planning* yang masih banyak kekurangan dan sangat diperlukan perbaikan aplikasi *e planning* atau munculnya aplikasi lain yang memiliki fungsi sama tetapi lebih bagus dari aplikasi *e planning*.